

# ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA Studi Kasus di Kantor BKKBN Kabupaten Serang

*ANALYSIS OF FACTORS HINDERING THE USE OF MANAGEMENT INFORMATION  
SYSTEM IN FAMILY WELFARE DEVELOPMENT:  
A Case Study in National Family Planning Coordinating Board Office  
of Serang District.*

Erwandi R<sup>1</sup> dan Johana Endang Prawitasari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Kantor BKKBN Kabupaten Serang

<sup>2</sup> Magister Manajemen Pelayanan Kesehatan, UGM Yogyakarta

## ABSTRACT

**Background:** The purpose of this study is to determine causes hindering the use of management information system (MIS) in Family Welfare Development (FWD) of the National Family Planning Coordinating Board (NFPCB) of the Serang District Office. Specific purposes include: (1) to determine obstacles of the activity circles from data planning and information up to controlling data and information; (2) to determine whether facility, fund, limited personnel, and inadequate place could hinder the use of MIS of the FWD; (3) to determine whether the personnel in NFPCB Serang district could use the MIS of the FWD.

**Methods:** This Study is a descriptive case study using qualitative data which was collected by: (a) observation of the activity circles of MIS; (b) in depth-interview with Head of the NFPCB office, Chief of Planning and Evaluation Program Section, and Chief of Data Processing and Reporting Sub-Section; (c) Focus Group Discussion with Supervisors of Family Planning field workers.

**Results:** This study revealed that activity circles of MIS of FWD in NFPCB was not yet totally worked as planned. Facility, fund had not been utilized effectively and efficiently. There were limited personnel and inadequate place. Personnel were not aware of the importance of information for decision making and yet they could not use the information properly since their own activities were not done properly as well.

**Conclusion:** Commitment and awareness of the personnel only could not guarantee the proper use of MIS. It was also found that there were limited number of personnel and inadequate place that hinder the use of MIS in NSPCB office in Serang district.

*Keywords:* family welfare, information, management

## PENGANTAR

Kantor BKKBN Kabupaten Serang sebagai lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan fungsinya mengkoordinasi pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional di daerah, adalah kantor BKKBN Tipe A susunan organisasi sebagai berikut: (a) Kepala Kantor (b) Sub Bagian Tata Usaha (c) Sub Bagian Supervisi (d) Seksi Penyusunan dan Penilaian Program (e)

Seksi Keluarga Berencana (f) Seksi Keluarga Sejahtera (g) Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Perkembangan pencapaian program Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Serang setiap tahun terus meningkat, hal ini dapat terlihat bahwa selama tahun 1993/1994 sebanyak 52.094 akseptor atau Pasangan Usia Subur (PUS) dapat diajak untuk menjadi peserta KB dengan menggunakan alat/obat

kontrasepsi yang tersedia. Berturut-turut pada tahun 1994/1995 sebanyak 60.368 akseptor, tahun 1995/1996 sebanyak 62.564 akseptor, tahun 1996/1997 sebanyak 69.944 akseptor, dan pada tahun 1997/1998 sebanyak 83.742 akseptor. Kelangsungan pemakaian alat kontrasepsi atau peserta KB Aktif juga meningkat, jika pada tahun 1993/1994 baru 61,10% dari seluruh PUS, maka pada tahun 1997/1998 jumlahnya sudah mencapai 75,30% dari seluruh PUS dapat terjaga kelangsungan pemakaian alat kontrasepsinya. Selain dari itu, jumlah keluarga pra sejahtera yang pada tahun 1995 sebanyak 21,33% dari seluruh keluarga, dan keluarga sejahtera I sebanyak 35,07%. Maka pada tahun 1998 jumlah keluarga pra sejahtera hanya 4,58% dari seluruh keluarga sedangkan keluarga sejahtera I sebanyak 33,23%.

Perkembangan pencapaian Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang dilandasi oleh tingginya pemahaman setiap keluarga akan pentingnya merencanakan keluarga guna menghadapi tantangan masa depan yang semakin luas dan penuh persaingan, maka perlu didukung dengan pelaksanaan suatu sistem informasi manajemen yang handal<sup>1</sup>. Sistem informasi manajemen harus dapat membantu unsur pimpinan diberbagai tingkatan untuk melakukan pengambilan keputusan, baik dalam hubungannya dengan perencanaan, pengawasan atau jalannya kegiatan, oleh karena itu harus dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan manajemen. Rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera terdiri dari: perencanaan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyebarluasan, pendokumentasian, pengendalian.

Perencanaan sistem informasi pada umumnya dilaksanakan secara nasional dan regional, sehingga daerah langsung melaksanakan pengumpulan data dengan menggunakan formulir atau instrumen yang sudah baku. Pengumpulan data dan informasi selain dilakukan oleh unsur BKKBN secara intern juga banyak melibatkan institusi masyarakat yang pada umumnya masih memiliki tingkat pendidikan relatif rendah disamping dukungan dana kurang memadai.

sehingga belum menghasilkan data dan informasi yang cukup bermutu. Pengolahan data diawali dengan penerimaan laporan yang disampaikan oleh P.PLKB ke tingkat kabupaten pada setiap bulan, didukung dengan dua unit komputer (PC) dan satu orang operator, sedangkan di tingkat kecamatan masih dilakukan secara manual. Penyajian data tidak dilakukan, karena ruangan khusus untuk itu belum tersedia, demikian pula penyebarluasan data dan informasi tidak dilakukan secara rutin setiap bulan. Pendokumentasian tidak sistematis sehingga sangat rawan dari kerusakan dan kehilangan arsip. Pengendalian yang dilakukan melalui biribingan teknis dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan belum.

Keberadaan informasi dalam suatu organisasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan sangat diperlukan, karena dalam proses pengambilan keputusan sangat tergantung pada jenis, mutu dan kuantitas informasi yang tersedia<sup>2</sup>. Pada organisasi publik seperti BKKBN, maka reputasi organisasi, efisiensi dan efektivitas layanan terhadap masyarakat akan dapat ditingkatkan apabila unsur pimpinan mampu mengelola organisasi secara adaptif dengan memanfaatkan informasi yang berguna bagi organisasi, sehingga tanggap terhadap kebutuhan masyarakat<sup>1</sup>.

Rangkaian kegiatan Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Keluarga Sejahtera harus dapat dilaksanakan secara keseluruhan untuk dapat memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh pengguna terutama untuk menentukan strategi dan penentuan kebijaksanaan. Hal ini menurut Sarmini<sup>4</sup> bahwa keberhasilan manajemen ditentukan dengan berjalannya sistem manajemen, adanya kewenangan yang jelas, jumlah tenaga yang memadai, pembagian tugas yang jelas, kenyamanan ruang kerja, dan komitmen semua pelaku.

Dalam mengambil keputusan pimpinan memerlukan informasi yang bermutu, karena dengan informasi yang memiliki kualitas tinggi akan sangat menentukan efektivitas keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan. Kualitas

informasi ditentukan oleh tiga hal, yaitu: akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi<sup>5</sup>. Untuk dapat meningkatkan mutu data dan informasi yang dikumpulkan melalui sistem pencatatan dan pelaporan, dan agar dapat disampaikan secara tepat waktu perlu didukung dengan peralatan komputer yang memadai sehingga dapat membantu mempermudah dalam pengolahan data. Karena menurut Campbell<sup>6</sup> penggunaan teknologi komputer menawarkan suatu pengembangan bagi perawatan pasien, operasional dan kepentingan analisa secara potensial, efisien yang dibutuhkan oleh suatu sistem informasi. Kelancaran pelaksanaan sistem informasi mutlak harus dapat terjamin, sebab pencapaian tujuan organisasi dapat terganggu karena terhambatnya saluran informasi yang disebabkan karena (a) adanya keputusan yang tidak sesuai dengan persoalan yang dihadapi (b) proses komunikasi tidak sampai sasaran dan (c) proses manajemen tidak stabil<sup>7</sup>.

Keluarga Berencana adalah suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Kesejahteraan masyarakat ditentukan oleh tingkat kesejahteraan setiap keluarga, dan apabila fertilitas tidak dikendalikan akan membahayakan kesehatan ibu dan anak selanjutnya mempengaruhi kesehatan anggota keluarga yang lain<sup>8</sup>.

Dukungan politis yang diberikan pemerintah terhadap pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional adalah dengan lahirnya Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Menurut Siagian<sup>9</sup> kegiatan-kegiatan tri tunggal dalam Keluarga Berencana, yaitu pelayanan teknis medis pendidikan dan penerangan hanya dapat dilakukan dengan berhasil apabila keputusan-keputusan tentang sifat lingkup, sasaran, metode dan alat-alat pelaksanaannya didasarkan kepada informasi yang tepat dan tidak ketinggalan waktu,

Perkembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional yang dilandasi oleh tingginya pemahaman setia keluarga akan pentingnya merencanakan keluarga guna menghadapi tantangan masa depan yang semakin luas dan penuh tantangan, perlu didukung dengan suatu sistem informasi manajemen yang handal<sup>1</sup>. Pencatatan dan pelaporan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera. Pencatatan yang tertib akan dapat menghasilkan laporan yang bermanfaat bagi pimpinan untuk mengarahkan kegiatan dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien dan efektif<sup>1</sup>.

Mekanisme pencatatan dan pelaporan Gerakan Keluarga Berencana Nasional diawali dengan pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun sekali dan melibatkan berbagai unsur terutama institusi masyarakat yang berada di tingkat desa ke bawah. Para pengguna yang melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Gerakan Keluarga Berencana Nasional, Pembangunan Keluarga Sejahtera dan kegiatan kependudukan, dapat menggunakan hasil pendataan dan pemetaan keluarga sebagai informasi yang diperlukan dalam penyusunan kegiatan operasional, perencanaan dan dokumentasi<sup>10</sup>.

Rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera yang terdiri dari: perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyebarluasan, pendokumentasian, dan pengendalian merupakan kebutuhan program yang harus dapat dilakukan dengan baik sehingga mampu menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan dalam mengambil keputusan<sup>1</sup>. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sistem informasi manajemen sangat ditentukan oleh tersedianya fasilitas dana, sarana, dan tenaga yang mendukungnya. Ketersediaan unsur tenaga agar dapat menunjang keberhasilan sistem memerlukan komitmen dan motivasi sehingga mampu melaksanakannya dengan baik sesuai kebutuhan. Menurut Siagian<sup>8</sup> manusia sebagai makhluk hidup bersedia memberikan yang terbaik pada dirinya, waktunya, tenaganya, keahliannya dan keterampilannya apabila ia

diyakini akan diberi balas jasa yang setimpal dengan jasa-jasa yang diberikannya. Didalam organisasi dimana terdapat unsur pimpinan dan bawahan, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam sistem informasi manajemen perlu diwujudkan sikap positif setiap pejabat menjadi perilaku, untuk itu pimpinan perlu menimbulkan minat berperilaku para bawahannya dengan memperhatikan komponen norma subjektif, yaitu motivasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas<sup>11</sup>.

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab terhambatnya penggunaan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera di kantor BKKBN Kabupaten Serang. Dan secara khusus untuk mengetahui: (1) hambatan pada setiap rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera (2) mengapa fasilitas dana, sarana, dan tenaga dapat menghambat penggunaan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera, dan (3) hambatan bagi pengguna di kantor BKKBN Kabupaten Serang.

## BAHAN DAN CARA PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kasus bersifat eksploratif deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Materi penelitian adalah rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera yang terdiri dari: perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian dan penyebarluasan, pendokumentasian, pengendalian. Informan penelitian adalah 1 Kepala Kantor, 1 Kepala Seksi Penyusunan dan Penilaian Program, 1 Kepala Sub Seksi Pengolahan Data Pelaporan, dan 36 Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui: (a) observasi, dengan melihat secara langsung

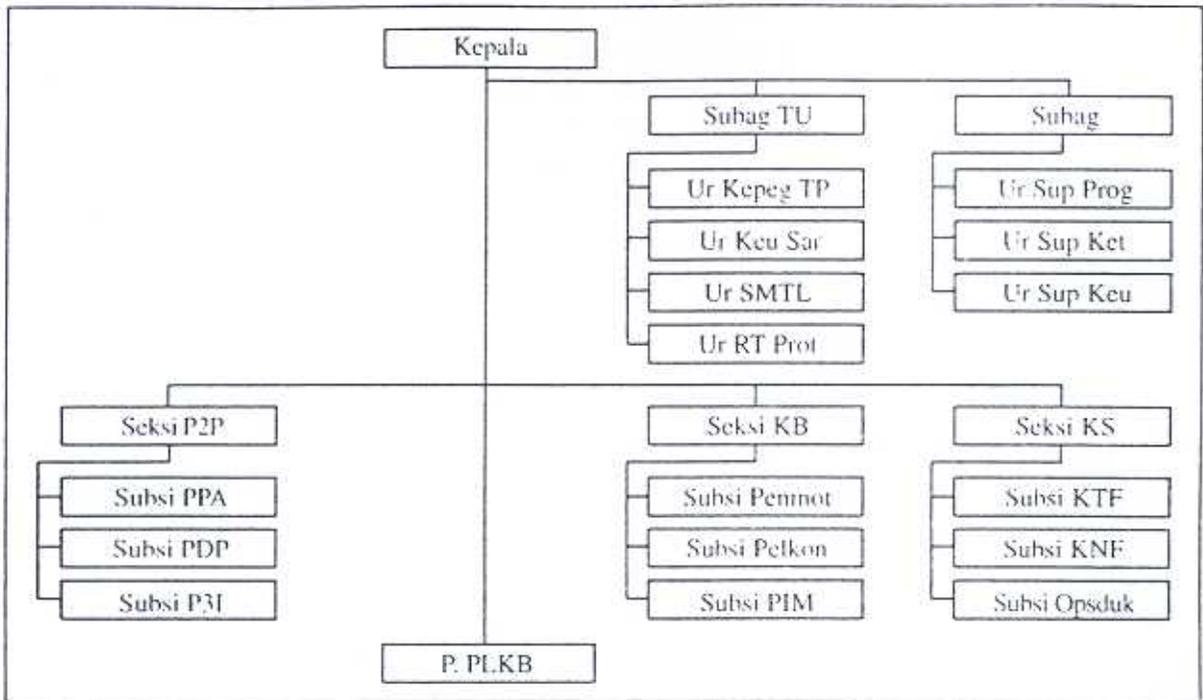
seluruh rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera, data dikumpulkan menggunakan *check-list* untuk mendapatkan gambaran dari aktivitas dan masalah objek yang diteliti (b) wawancara mendalam dengan Kepala Kantor, Kepala Seksi P2P, Kepala Sub Seksi PDP, menggunakan pedoman wawancara (c) diskusi kelompok terarah dengan Pengawas PLKB, menggunakan pedoman diskusi untuk mendapatkan informasi tentang hambatan dalam penggunaan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera. Data sekunder yang mendukung data primer diperoleh dengan melihat dokumen-dokumen dan arsip-arsip laporan yang tersedia di kantor BKKBN Kabupaten Serang.

Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk gambar, tabel dan uraian secara triangulasi, yaitu dengan menggabungkan hasil observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah, untuk mendapatkan informasi yang paling sesuai dengan materi penelitian, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif. Selanjutnya informasi yang diperoleh diintegrasikan dengan teori yang ada.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Sistem Informasi Manajemen Pembangunan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan hasil observasi terlihat bahwa secara fungsional sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera di kantor BKKBN Kabupaten Serang dilaksanakan oleh Seksi Penyusunan dan Penilaian Program (P2P), dan secara berjenjang di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh Pengawas Petugas Lapangan Keluarga Berencana (P.PLKB). Disajikan pada Gambar 1.

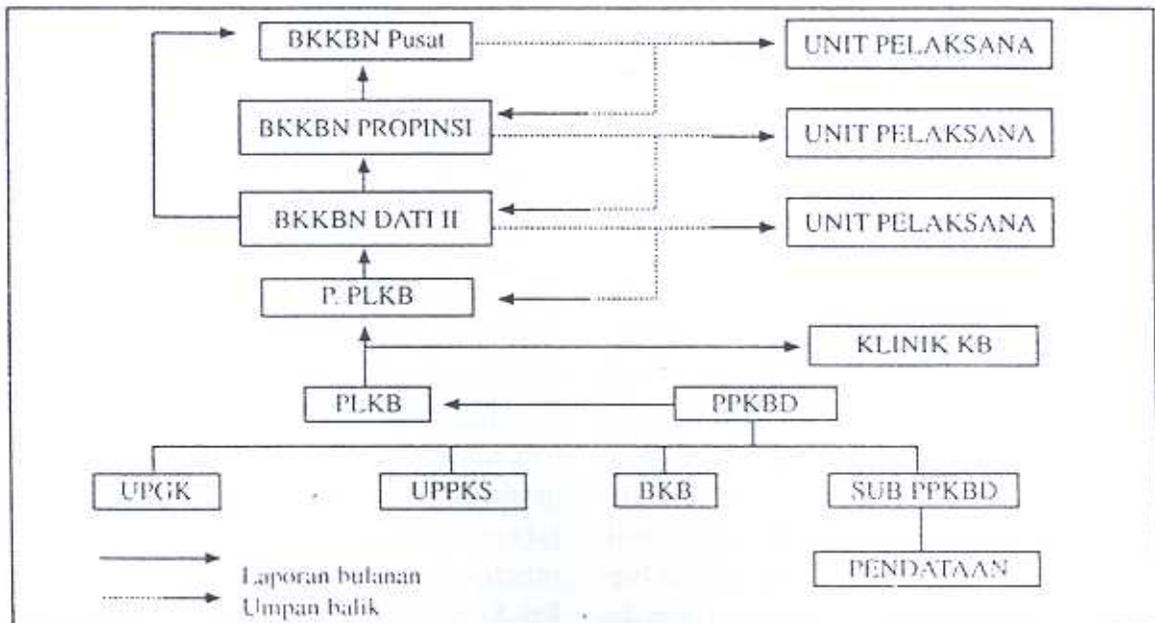


Gambar 1. Struktur Organisasi Kantor BKKBN Kabupaten Serang

Sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera didalam pelaksanaannya sangat ditentukan oleh adanya kerjasama antar komponen secara *intern*, dan juga dinas instansi terkait lainnya terutama unit pelaksana Gerakan Keluarga Berencana Nasional di semua tingkatan.

Kegiatan pencatatan dan pelaporan yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi

terpilih sebagai kebutuhan manajemen, terutama dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijaksanaan, dilaksanakan secara terpadu mulai dari tingkat RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten sampai ke tingkat Pusat. Mekanisme pencatatan dan pelaporan pembangunan keluarga sejahtera terlihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Bagan Mekanisme Pencatatan dan Pelaporan

Dari bagian mekanisme pencatatan dan pelaporan terlihat bahwa data dan informasi yang diperlukan dalam sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera bersumber dari hasil pendataan keluarga. Hasil pendataan keluarga tersebut merupakan sumber data dalam pembuatan laporan selanjutnya secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. Rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera di kantor BKKBN Kabupaten Serang diuraikan lebih lanjut berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam dan diskusi kelompok.

#### a. Perencanaan Sistem Informasi

Dalam pelaksanaan operasional keluarga berencana sangat ditentukan oleh kemampuan unsur pimpinan dalam menentukan prioritas sasaran sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam perencanaan sistem informasi dilaksanakan secara nasional dan regional, dan tenaga pelaksana di tingkat daerah hanya melaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah disediakan. Perencanaan dari tingkat kabupaten terbatas pada kebutuhan sarana atau formulir pencatatan dan pelaporan, sedangkan pengadaannya tergantung dari *droping* dari pusat dan propinsi. Dari wawancara dengan kepala seksi P2P dan kepala sub seksi PDP terungkap bahwa pada tahun 1998 tidak ada *droping* atau pengadaan sarana pencatatan dan pelaporan, sehingga tingkat daerah harus mengadakan sendiri tanpa dukungan dana.

#### b. Pengumpulan Data dan Informasi

Pengumpulan data melalui kegiatan pendataan keluarga yang dilaksanakan secara nasional sejak tahun 1994 melibatkan institusi masyarakat dibawah binaan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dengan kunjungan dari rumah kerumah. Sebagai sumber pembuatan laporan, maka pendataan keluarga ini harus dapat dilaksanakan dengan baik agar mampu menghasilkan pencatatan yang tertib untuk selanjutnya tercipta laporan yang bermanfaat bagi seorang pimpinan untuk mengarahkan kegiatan dan menggunakan sumber daya yang tersedia secara

lebih efisien dan efektif". Dari wawancara dengan P.PLKB terungkap bahwa karena pelaksanaannya adalah institusi masyarakat yang tingkat pendidikan dan pemahamannya relatif masih rendah, maka mutu data yang didapatkan belum akurat. Dana yang terbatas tidak sesuai dengan luasnya wilayah garapan dan banyaknya sasaran keluarga yang harus didata juga mempengaruhi motivasi kerja petugas dalam melaksanakan pendataan keluarga.

#### c. Pengolahan Data dan Informasi

Pengolahan data dan informasi diawali dengan penerimaan laporan dari tingkat kecamatan yang disepakati setiap akhir bulan laporan. Tanggal pemasukan laporan belum dipantau dengan baik oleh kepala sub seksi PDP, namun dari hasil pengamatan antara 2 sampai 4 P.PLKB terlambat memasukkan laporan setiap bulannya. Pengolahan data di kantor BKKBN Kabupaten Serang telah menggunakan komputer (PC) sedangkan *software*-nya dari pengadaan tingkat propinsi. Pengolahan di tingkat kecamatan masih dilakukan secara manual sehingga pemasukan (*entry*) data di tingkat kabupaten harus dilakukan satu persatu dan cukup menyita tenaga operator yang hanya satu orang menghadapi banyaknya laporan yang harus diselesaikan. Akan lebih mempermudah pengolahan data seandainya mulai dari tingkat kecamatan sudah dilakukan dengan komputer, karena menurut Campbell<sup>6</sup> dengan penggunaan teknologi komputer akan memberikan suatu pengembangan bagi kepentingan analisis secara potensial dan efisien yang dibutuhkan dalam sistem informasi manajemen.

Dari hasil observasi terhadap laporan yang dibuat pada Maret 1998 antara FII/PKS-Kec dan Rek.Kec/R/I/KS data jumlah akseptor KB, jumlah bukan peserta KB, dan tahapan keluarga sejahtera terdapat perbedaan. Dari wawancara dengan P.PLKB terungkap bahwa hal itu terjadi karena pendataan keluarga dilaksanakan sejak Januari bahkan ada yang dilaksanakan Desember tahun sebelumnya, kemudian di rekap ke dalam Rek.Kec.R/I/KS pada Maret, sedangkan perubahan yang terjadi selama itu tidak dicatat. Oleh karena

itu, maka meskipun tanggal pembuatannya sama pada akhir Maret namun datanya sudah tidak sama lagi.

#### d. Analisis Data dan Informasi

Hasil analisis berupa informasi secara kuantitatif dan kualitatif sangat diperlukan oleh manajemen, karenanya harus memiliki kualitas yang benar-benar bermanfaat bagi keputusan yang diambil. Kualitas informasi menurut Kusnanto<sup>5</sup> ditentukan oleh tiga hal, yaitu: akurasi, ketepatan waktu dan relevansi. Dari wawancara dengan P.PLKB terungkap bahwa karena mutu laporan yang dibuat belum akurat, maka hasil analisis banyak yang tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kondisi ini menghambat penggunaan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera, terutama dalam kegiatan operasional didalam rangka kegiatan-kegiatan strategis seperti peningkatan tahapan keluarga sejahtera.

#### e. Penyajian dan Penyebarluasan Data dan Informasi

Dalam proses pengambilan keputusan, informasi manajemen mempunyai peranan yang strategis karena harus menyediakan informasi yang benar, mudah, cepat, dan tepat sehingga tujuan Gerakan Keluarga Berencana Nasional dapat dicapai secara optimal'. Penyajian data pada kantor BKKBN Kabupaten Serang dari hasil observasi terlihat belum dilaksanakan. Dari wawancara dengan kepala seksi P2P terungkap bahwa hal itu belum dilaksanakan karena belum tersedia ruangan atau tempat yang layak dan memadai untuk penempatan data dan informasi. Demikian pula di tingkat kecamatan, karena P.PLKB tidak mempunyai ruangan kantor sendiri melainkan masih menumpang di kantor kecamatan atau puskesmas, maka penyajian data belum dapat dilaksanakan dengan sempurna. Penyebarluasan data dan informasi masih terbatas pada kalangan sendiri dan sebagian besar dilaksanakan melalui

forum pertemuan atau rapat di tingkat kabupaten dan kecamatan.

#### f. Pendokumentasian Data dan Informasi

Dari hasil observasi terlihat bahwa pendokumentasian arsip data dan informasi di kantor BKKBN Kabupaten Serang belum dilaksanakan dengan baik. Sedangkan menurut Syamsi<sup>12</sup> karena informasi yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pimpinan maka dalam waktu singkat harus dapat disajikan dengan sebaik-baiknya, oleh karena itu harus di dokumentasikan dan disimpan secara sistematis. Dari wawancara dengan kepala seksi P2P dan kepala sub seksi PDP terungkap bahwa kurangnya fasilitas sarana sangat menghambat pendokumentasian data dan informasi dengan baik dan sempurna. Selain itu, banyaknya tugas-tugas yang harus diselesaikan dan terbatasnya tenaga staf juga menjadi penghambat kegiatan pendokumentasian tersebut.

#### g. Pengendalian Data dan Informasi

Pengendalian data dan informasi dilakukan dengan melaksanakan bimbingan secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke tingkat kecamatan dan desa. Kegiatan ini belum dapat meningkatkan mutu data dan informasi yang disampaikan melalui pencatatan dan pelaporan. Pelaksanaannya sering tidak berkelanjutan, karena perencanaan bimbingan tidak didasarkan kepada hasil sebelumnya. Kemampuan petugas untuk memahami kegunaan data dan informasi bagi manajemen masih terbatas kepada penyediaan atau penyampaian laporan tanpa memahami tujuan dari setiap pelaporan tersebut bagi kepentingan pimpinan dalam pengambilan keputusan. Unsur pimpinan perlu menimbulkan minat berperilaku sehingga timbul sikap positif pejabat struktural dengan memperhatikan komponen norma: subjektif, yaitu motivasi dan keteladanan dalam melaksanakan tugas<sup>11</sup>.

## 2. Aspek Fasilitas

Fasilitas sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera di kantor BKKBN

Kabupaten Serang terdiri dari dana, tenaga, dan sarana. Menurut Sarnini<sup>1</sup> keberhasilan manajemen ditentukan oleh berjalannya sistem, adanya kewenangan, jumlah tenaga yang memadai, pembagian tugas yang jelas, kenyamanan ruang kerja, dan komitmen dari semua pelaku.

#### a. Dana

Anggaran dana kantor BKKBN Kabupaten Serang bersumber dari APBN, Bantuan Luar Negeri (SDES), dan APBD II. Belum semua dana untuk sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu: penyajian dan penyebaran data dan informasi, pendokumentasian belum dilaksanakan secara sistematis dan baik.

#### b. Tenaga dan Pembagian Tugas

Jumlah tenaga staf di kantor BKKBN Kabupaten Serang dirasakan masih sangat kurang, hal ini terlihat dari belum semua pejabat struktural memiliki tenaga staf sehingga menyulitkan dalam pembagian tugas. Akibatnya, bagi tenaga struktural yang tidak mempunyai tenaga staf harus dapat melaksanakan tugas rangkap yang seharusnya dapat dikerjakan oleh staf. Komponen P2P yang secara fungsional mengkoordinir kegiatan sistem informasi manajemen hanya mempunyai dua tenaga staf dan yang aktif hanya satu orang merangkap sebagai operator komputer.

#### c. Sarana

Penyimpanan arsip dilakukan dengan cara yang sangat sederhana kedalam map *snelhechter* dan *ondier*, serta diletakkan diatas meja atau lemari bercampur dengan berkas surat-surat lainnya. Tidak ada lemari khusus bagi penyimpanan arsip-arsip laporan maupun hasil pengolahan data dan informasi. Kondisi ini sangat rawan dari kerusakan dan kehilangan arsip karena kegiatan kantor juga dilakukan pada tempat yang sama. Ruang tempat pengolahan data masih bersatu dengan perpustakaan, sangat tidak nyaman dengan ukuran 3,5 M X 4 M, didalam ruangan tersebut terdapat 2 unit PC, 1 meja 1/2 biro, 2 lemari, 2 kursi tamu, dan 2 rak buku. Belum dilengkapi dengan penyejuk ruangan (AC) dan sarana penerangan juga sangat

kurang, sehingga mempengaruhi ketelitian dalam proses pengolahan data. Di samping itu ketenangan juga kurang terjaga, karena pengunjung perpustakaan selalu ada karena terbuka untuk umum selama jam kerja.

#### 3. Pengguna

Tujuan utama yang ingin dicapai dari sistem informasi manajemen adalah membantu pimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat<sup>2</sup>. Untuk itu unsur pimpinan harus mempunyai visi kedepan dan rasa percaya diri dalam pengambilan keputusan, memahami perubahan-perubahan di lingkungannya dan mengantisipasi secara tepat dan benar<sup>3</sup>. Dari hasil wawancara dengan kepala kantor, kepala seksi P2P, kepala sub seksi PDP, dan P.PLKB terungkap bahwa pengguna (a) memahami dengan tingginya dinamika dan luasnya cakupan Gerakan Keluarga Berencana Nasional, maka pengambilan keputusan oleh pimpinan dan pengelola dilakukan dengan penuh pertimbangan, berdasarkan informasi yang cepat, lengkap dan akurat, (b) menyadari bahwa pencatatan dan pelaporan yang baik akan memberikan data dan informasi yang baik pula, karena itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, (c) memanfaatkan dengan sebaik-baiknya sarana yang ada namun belum dapat menghasilkan data dan informasi secara optimal<sup>4</sup>.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Masih ditemukan hambatan dalam penggunaan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera yang disebabkan karena belum seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program.
2. Fasilitas dana belum dapat menunjang pelaksanaan kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera secara efektif dan efisien, tenaga sangat terbatas, sarana belum memadai dan tidak nyaman.
3. Pengguna sudah menyadari pentingnya kelancaran penggunaan sistem informasi manajemen, sehingga dapat berguna bagi unsur pimpinan dan pengeola program didalam pengambilan keputusan. Namun, karena

keterbatasan tenaga, dan sarana yang kurang memadai maka beberapa kegiatan belum dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan program, sehingga menghambat penggunaan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera.

#### Saran

1. Untuk memperlancar pelaksanaan rangkaian kegiatan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera, maka perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan fasilitas dana, tenaga, dan sarana. Kegiatan pendataan keluarga yang banyak melibatkan institusi masyarakat perlu didukung dengan dana yang memadai dan sesuai dengan cakupan wilayah serta jumlah sasarnya.
2. Kegiatan pengolahan dan analisis agar dapat menghasilkan data dan informasi yang tepat, cepat, dan akurat maka perlu ditunjang dengan penyediaan sarana komputer yang sesuai dengan kebutuhan pengguna sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera baik di tingkat kabupaten sampai ke tingkat kecamatan. Pendokumentasian perlu didukung dengan penyediaan tempat atau sarana yang memadai sehingga dapat dilaksanakan secara baik dan sistematis.
3. Penyajian data dan informasi dapat dilaksanakan setiap saat tanpa harus menunggu tersedianya tempat atau ruangan khusus, walaupun hal itu juga perlu untuk menjaga penampilan. Ruang rapat atau ruang tamu kantor dapat dimanfaatkan untuk tempat penyajian data dan informasi. Ruangan pengolahan data memang memerlukan perhatian khusus karena menentukan gairah kerja dan motivasi petugas dalam menyediakan data dan informasi yang baik dan bermanfaat bagi manajemen.
4. Untuk melakukan pengendalian agar sesuai dengan kebutuhan sistem informasi manajemen pembangunan keluarga sejahtera, maka pengetahuan dan kemampuan serta

motivasi pejabat struktural perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan secara teratur, sehingga mampu memberikan atau meningkatkan komitmen disemua tingkatan pengelola program.

#### KEPUSTAKAAN

1. BKKBN. Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga, Jakarta, 1994.
2. Siagian, S.P. Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, 1983.
3. Kumorotomo, W., Margono, S. A. Sistem Informasi Manajemen, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
4. Sarmini. Analisis Terhadap Faktor Keberhasilan Manajemen Obat Di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Pandan Arang Boyolali, [Tesis] Magister Manajemen Rumahsakit, UGM, Yogyakarta, 1998.
5. Kusnanto, H. Informasi Kesehatan, MMPK-UGM, Yogyakarta, 1998.
6. Campbell, G.P. Information System Planning: Luxury or Necessity?, Dimension in Health Care, 1985; 85(2):8-12
7. Affandi, B. Pekerja Wanita dan Keluarga Berencana, MDK 1990; 9(10): 50-52
8. Siagian, S.P. Teori Motivasi dan Aplikasinya, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
9. Pusdiklat BPKP. Modul Sistem Pengendalian Manajemen, BPKP, Jakarta, 1998.
10. BKKBN. Mekanisme Operasional Gerakan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Tingkat Kecamatan dan Desa, Jakarta, 1997.
11. Sidik, H.P. Analisis Sikap Pejabat Struktural Dalam Mematuhi Pedoman Kerja RSUD Dr. Moewardi Surakarta. [Tesis] Magister Manajemen Rumahsakit, UGM, Yogyakarta, 1993.
12. Syamsi, I. Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
13. Marsono. Analisis Perencanaan Program Puskesmas, [Tesis] Magister Manajemen Rumahsakit, UGM, Yogyakarta, 1997.